# EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PEKEBUN KELAPA SAWIT

# THE EFFECTIVENESS OF ORDINANCE AND LAW IN EMPOWERING AN OIL PALM FARMER'S GROUP

Teguh Wahyono, Rizki Amalia, dan Muhammad Akmal Agustira

Abstrak Banyak peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah yang substansinya adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat pertanian. Namun, petani pekebun kelapa sawit (Elaeis guineensis) belum sepenuhnya tersentuh oleh kebijakan pemerintah tersebut sebagai fasilitator untuk upaya pemberdayaan. Dalam penelitian ini, permasalahan diarahkan seberapa jauh implementasi kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan mencapai sasaran pemberdayaan kelompok tani (POKTAN) pekebun kelapa sawit. Maka dari itu variabel kemampuan POKTAN setelah implementasi peraturan perundangan diharapkan berdampak positif pada variabel hasil upaya pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji hubungan antara implementasi peraturan perundangan dengan kemampuan POKTAN; (2) Mengkaji hubungan antara kemampuan POKTAN dengan kinerja yang diukur dengan tingkat adopsi teknologi dalam kultur teknis; (3) Mengetahui apakah POKTAN yang ada telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan unsur-unsur pemberdayaan dalam sikap dan perilaku anggota POKTAN.

Penelitian dirancang dalam bentuk kualitatif dari fenomena sosial ekonomi yang sebenarnya (aktual) dengan analisis kuantitatif sebagai suplemen. Metode analisis data kualitatif dengan menggunakan Analisis Komparasi Konstan dan Metode Statistik Non Parametrik. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi peraturan perundangan tidak selalu berpengaruh pada kemampuan POKTAN pekebun kelapa sawit; (2) Kemampuan POKTAN berhubungan positif dengan kinerja yang diukur dari tingkat adopsi teknologi dalam kultur teknis; (3) Sikap dan perilaku anggota POKTAN yang ada belum memenuhi semua kriteria yang sesuai dengan unsur-unsur pemberdayaan.

Kata kunci: kelapa sawit (Elaeis guineensis), peraturan-perundangan, petani pekebun, pemberdayaan

Abstract Many laws and regulations set by the Government which is substantially empowering smallholders community. However, oil palm planters farmers have not been completely untouched by government policies such as facilitator for empowerment. In this study, the issues focused on how far the implementation of government policy in the form of legislation to empower farmers achieve the oil palm smallholders' targets. The research aims to: (1) Assess the relationship between regulation implementation with the farmer's group capability, (2) Assess the relationship between the farmer's group capability with the performance of farmers in adopting culture technique, (3) Understand wether or not attitudes and behaviors of farmer groups member meet to qualification of empowerment elements. Qualitative research is designed in the form of socio-economic

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Teguh Wahyono (⋈)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan, Indonesia
Email: teguh\_sujanto@yahoo.com

phenomena of real (actual) with quantitative analysis as a supplement. Qualitative data analysis methods using Constant Comparative Analysis and Non-Parametric Statistical Methods. The results showed that: (1) The implementation of laws and regulations doesn't always has an impact to POKTAN of oil palm smallholders' ability; (2) POKTAN's ability has positive relation with performance which measured by the level of adoption in agronomic practice; (3) The attitudes and behaviors of POKTAN's members haven't met all the criteria which are suitable with empowerment elements.

Keywords: oil palm (Elaeis guineensis), smallholders, empowernment, policy, farmer groups

#### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka melakukan upaya pemberdayaan masyarakat pertanian, sudah cukup banyak peraturan perundangan yang diberlakukan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai sasarannya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, Presiden RI telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Kemudian Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M (Anonim, 2008b).

Terkait dengan kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditi penting dalam perekonomian, Pemerintah menyusun serangkaian kebijakan. Salah satunya dalam pemasaran hasil produksi pekebun kelapa sawit, adalah kebijakan yang memberikan perlindungan dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Berdasarkan hal tersebut pemerintah menetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.395/Kpts/OT.140/11/2005 yang kemudian diganti dengan No.17/Permentan/OT.140/2/ 2010. Permentan No.17/2010 ini sedang direvisi, dengan pengertian substansi penetapan harga tetap, maka dalam penelitian ini bersandar pada Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2005.

Kemudian pemerintah juga memberlakukan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/3/2007 yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Bantuan Sosial Kepada Petani (PMUK) Tahun Anggaran 2007. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian perlu dilanjutkan dan disempurnakan, maka pemerintah telah menetapkan Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 (Anonim, 2008a).

Selain peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas, masih banyak peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan pemerintah yang substansinya adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat pertanian. Namun petani pekebun kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) belum sepenuhnya tersentuh oleh kebijakan pemerintah tersebut sebagai fasilitator untuk upaya pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengkaji hubungan antara implementasi peraturan perundangan dengan kemampuan POKTAN;
- Mengkaji hubungan antara kemampuan POKTAN dengan kinerja yang diukur dengan tingkat adopsi teknologi dalam kultur teknis;
- Mengkaji apakah POKTAN yang ada telah memenuhi criteria yang sesuai dengan unsurunsur pemberdayaan dalam sikap dan perilaku anggota POKTAN.

#### Definisi Kelembagaan Pekebun Rakyat

Dalam bab ini dibahas pengertian istilah-istilah terkait dengan topik, yaitu meliputi kebijakan, pemberdayaan dan peraturan perundangan. Pembahasan pengertian tersebut diuraian sebagai berikut.

Pertama, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian atau seperangkat keputusan yang saling berhubungan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan sarana pencapaiannya dalam suatu situasi khusus dimana keputusan-keputusan itu seharusnya, secara prinsip, berada dalam kekuasaan para aktor tersebut (Jenkins, 1978 dalam Roes Setiyadi, 2007).



Untuk konteks Indonesia, kebijakan dimaksud adalah yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah (Anderson, 1997 dalam Santosa, 2006).

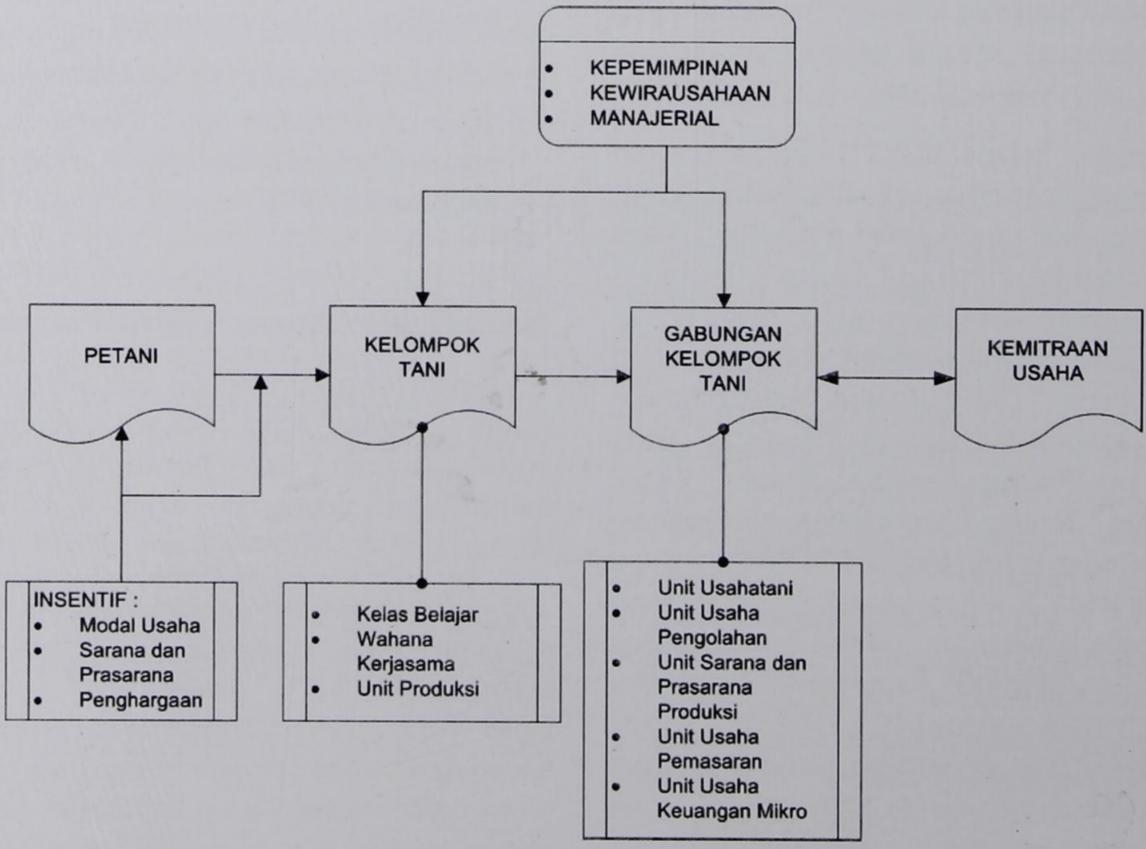
Kedua, pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan (Anonim, 2009). Sementara itu menurut Awandana (2009), pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Ketiga, peraturan perundangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Anonim, 2004a).

Pemberdayaan pada petani pekebun diarahkan

pada unit produksi yang diselenggarakan dan dikelola melalui pembentukan kelembagaan berupa POKTAN. Sebagai unit produksi, POKTAN diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut (Anonim, 2013b):

- Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya;
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan poktan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani oleh para anggota poktan sesuai dengan rencana kegiatan poktan;
- 4) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
- Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam poktan, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- 6) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana



Gambar 1. Paradigma pengembangan kelembagaan petani.

Figure 1. Paradigm of farmer's institution development.

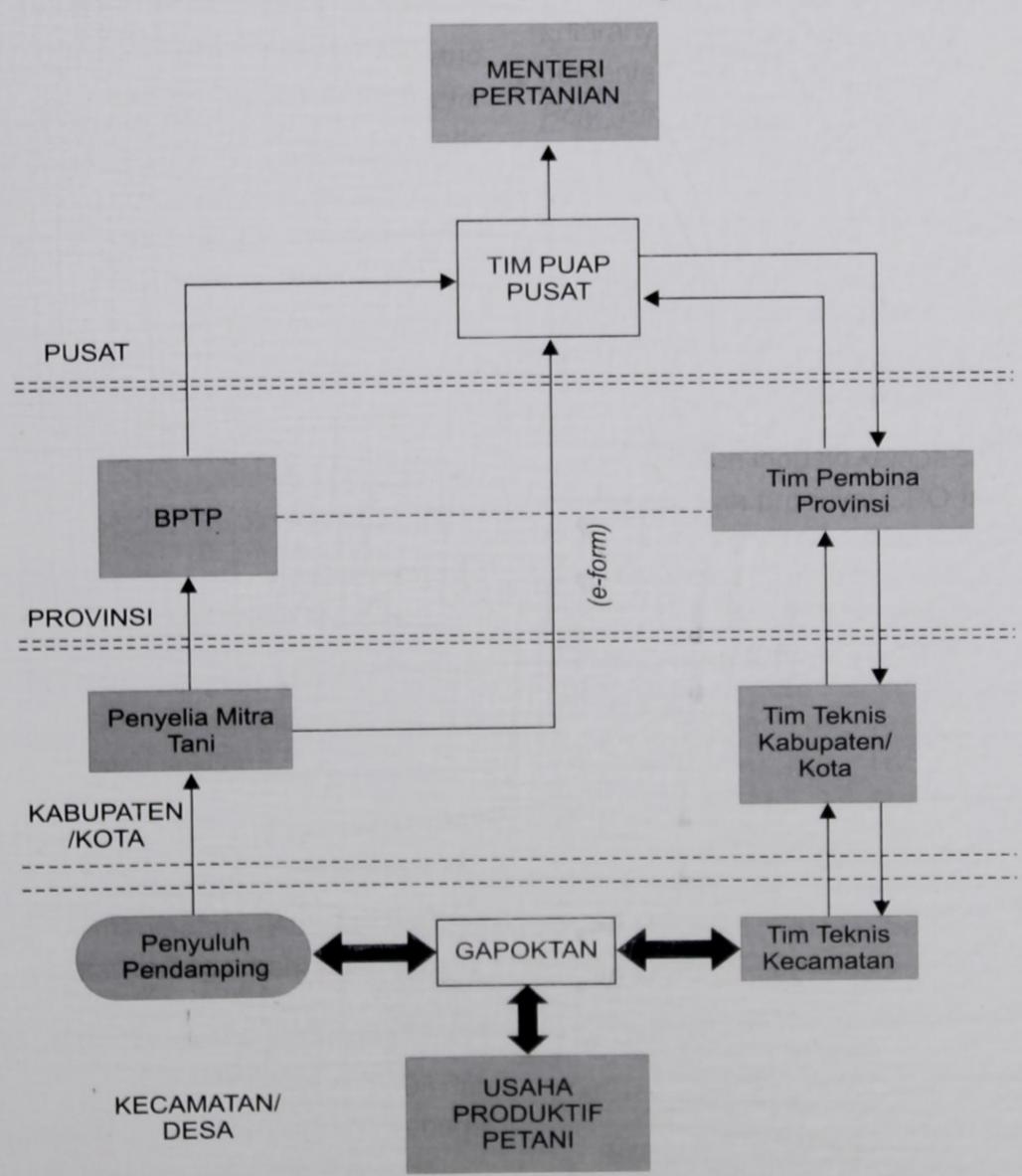


- kebutuhan poktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
- 8) Mengelola administrasi secara baik dan benar.

Kelembagaan POKTAN tersebut senantiasa perlu dikembangkan, yang menganut paradigma sebagaimana flow chart Gambar 1. Sementara itu usaha yang dilakukan oleh POKTAN juga perlu dibina dalam pengembangannya melalui kelembagaan formal, yaitu melalui implementasi Kepmentan No.273/Kpts/OT.1/160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani (Anonim, 2007a). Pengembangan usaha

POKTAN antara lain berupa agribisnis, yang juga difasiltasi oleh Kementan melalui pembentukan PUAP. Dalam pelaksanaan PUAP, Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kementan) No.545/ Kpts/OT.160/9/2007 (Anonim, 2007b). PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota yang salah satu tujuannya adalah memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis (Anonim, 2008b). Dalam pelaksanaan program PUAP tersebut kegiatannya meliputi antara lain pembinaan dan pengendalian, sebagaimana terlihat pada Gambar 2 (flowchart) berikut.

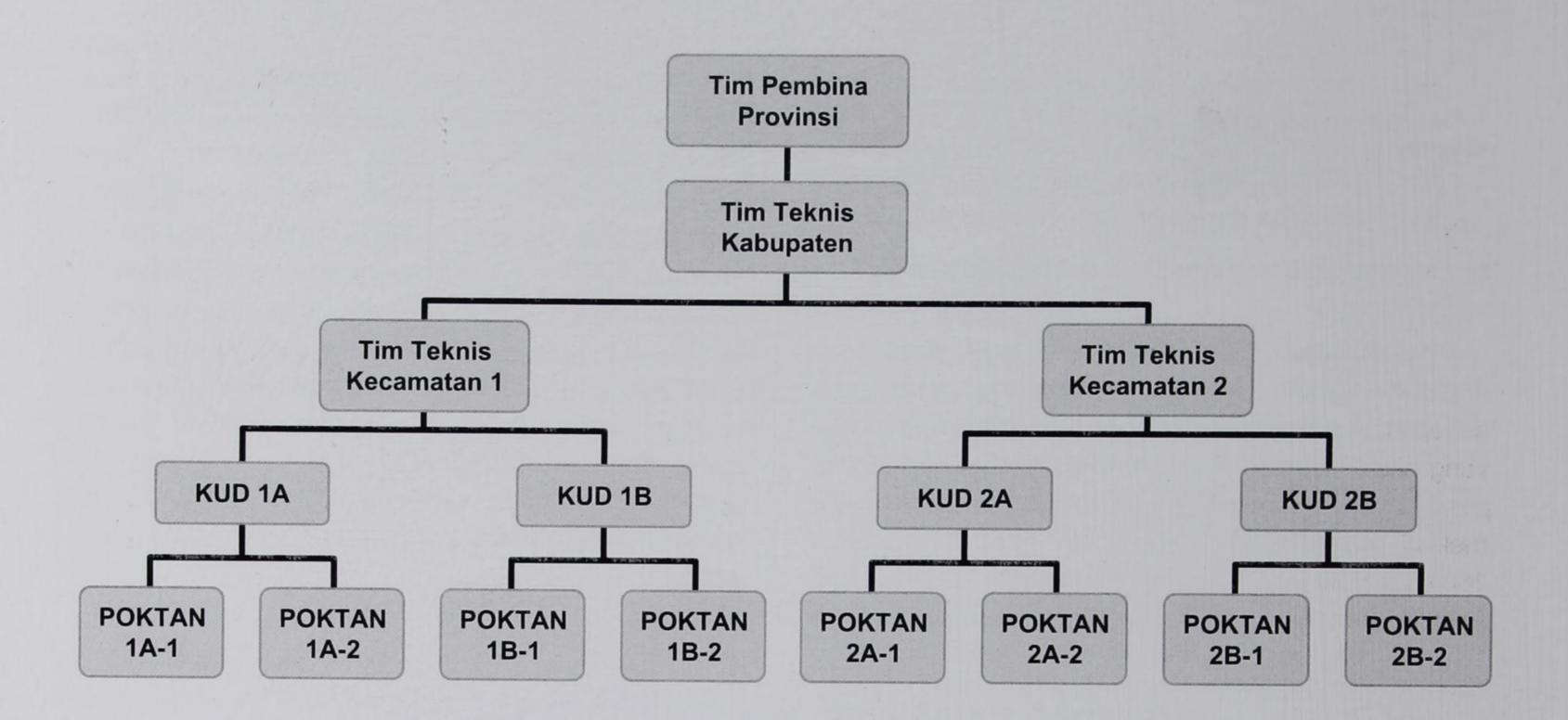
### Flowchart Pembinaan dan Pengendalian PUAP



Gambar 2. Pembinaan dan Pengendalian PUAP.

Figuer 2. Building and control rural agribisnis development (PUAP).





Gambar 3. Pembinaan pekebun plasma kelapa sawit. Figuer 3. A sample building of rural agribisnis development.

Dalam pembinaan dan pengendalian tersebut melibatkan beberapa kelembagaan baik yang ada di pusat maupun daerah, dan juga baik yang formal maupun non formal. Upaya ini sasarannya adalah usaha yang dilakukan oleh petani agar produktif.

Upaya yang telah dilakukan pada usaha kebun kelapa sawit oleh pekebun rakyat (plasma) kelapa sawit biasanya dalam bentuk flowchart yang lebih sederhana sebagai berikut (Gambar 3). Namun untuk tiap-tiap sentra produksi kelapa sawit perkebunan rakyat biasanya berbeda dalam bentuk pembinaannya, baik menurut pola maupun banyaknya lembaga yang terlibat, dan juga frekuensinya.

Diantara kriteria keberhasilan upaya pemberdayaan adalah bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang ideal menurut unsur-unsur pemberdayaannya (elements of empowerment) sebagai berikut (Narayan, 2005):

- 1) Memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan
- Memiliki akses terhadap informasi dan sumberdaya
- 3) Memiliki banyak alternative yang dapat dipilih
- 4) Memiliki ketegasan.

- 5) Perasaan secara individu yang dapat membuat perubahan
- Belajar berpikir kritis, tidak belajar karena pengaruh keadaan, melihat sesuatu secara berbeda;
- 7) Belajar tentang dan menyatakan kemarahan untuk kebaikan;
- Perasaan bukan untuk individu sendiri; tetapi perasaan merupakan bagian dari kelompok;
- 9) Pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak;
- 10) Menyebabkan perubahan dalam suatu kehidupan dan suatu masyarakat
- 11) Belajar ketrampilan yang seseorang menyatakan penting
- 12) Perubahan pendapat yang lain dari kompetensi dan kapasitas seseorang untuk bertindak.
- 13) Keluar dari rapat tertutup sebagai ungkapan protes, jika tak sepakat
- 14) Pertumbuhan dan perubahan secara terus menerus dan memulai dari diri sendiri
- Meningkatkan citra diri yang positif dalam mengatasi kekurangan.



Dalam penelitian ini, permasalahannya diarahkan pada seberapa jauh implementasinya kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan mencapai pada sasaran pemberdayaan petani pekebun kelapa sawit. Kemudian indikator pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku dari segi (Awang et al, 2008):

- Partisipasi, anggota POKTAN berpartisipasi penuh;
- Kreativitas, anggota POKTAN berusaha pantang menyerah;
- Akomodasi, anggota POKTAN mendengarkan, memahami dan mengakomodasi;
- 4) Keberanian, anggota POKTAN berani berbeda dengan yang lain;
- Argumentasi, anggota POKTAN mempunyai pendapat yang disertai dengan argumentasi;

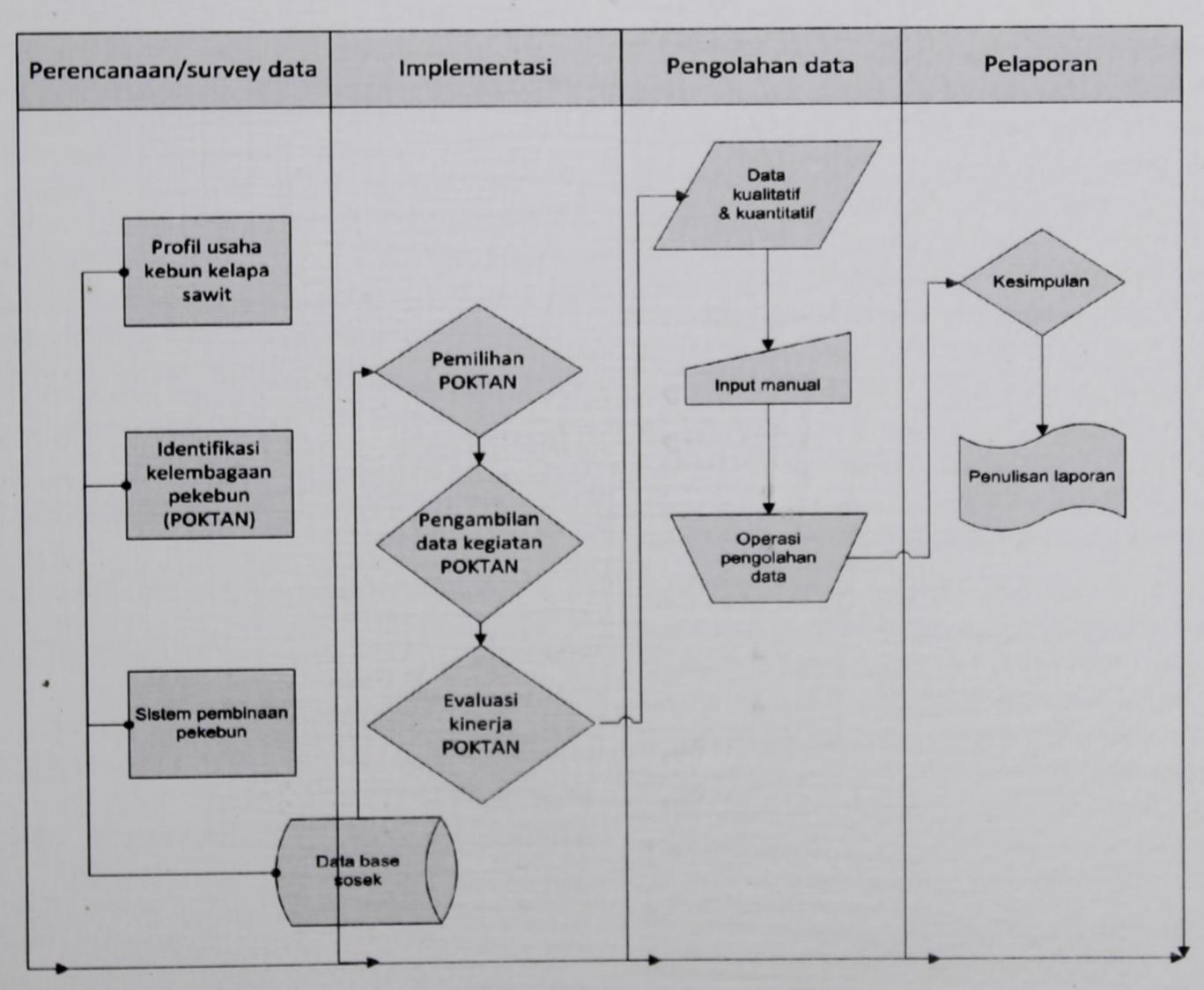
- Komunikatif, anggota POKTAN dapat menerima apapun infomasi yang disampaikan dapat diterima/dipahami orang lain;
- Inisiatif, anggota POKTAN selalu memulai berusaha (berinisiatif).

#### **BAHAN DAN METODE**

#### Ruang Lingkup Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian dirancang dalam bentuk kualitatif dari fenomena sosial ekonomi yang sebenarnya (aktual) dengan analisis kuantitatif sebagai suplemen, didasarkan pada pengembangan yang bersamaan dari teori dan pengamatan (Mantra, 2004). Proses atau prosedur penelitian ini meliputi serangkaian kegiatan sebagai berikut (lihat Gambar 4):

 Perencanaan/survey data. Kegiatan ini mencakup pengenalan profil usaha kebun kelapa sawit



Gambar 4. Prosedur kegiatan penelitian.

Figure 4. Procedure and step of research.



rakyat, identifikasi kelembagaan pekebun bahwa cara pengelolaannya secara berkelompok, sehingga terbentuk kelompok tani (POKTAN) berdasarkan hamparan usaha kebun. Agar mekanisme kerja kelembagaan berjalan efektif maka diperlukan pembinaan pekebun sebagai anggota POKTAN

- Implementasi. Kegiatan ini meliputi pemilihan sampel POKTAN, untuk digali informasinya lebih lanjut tentang kegiatan POKTAN.
- Pengolahan data. Kegiatannya berupa penyusunan dan tabulasi data, baik kuantitatif maupun kualitatif; kemudian melakukan input data secara manual agar dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.
- Pelaporan. Kegiatan ini merupakan tahap akhir, yaitu menarik kesimpulan dan penulisan laporan berupa buku.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah POKTAN hamparan pada perkebunan rakyat kelapa sawit. Dalam POKTAN ini terdapat unsur-unsur antara lain: saluran informasi, komunikasi dan interaksi yang menjadi sarana untuk penyusunan program pemberdayaan. Selanjutnya dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan inventarisasi, survei, dan evaluasi, serta analisis terhadap berbagai variabel meliputi sikap anggota POKTAN, kemampuan POKTAN dan kinerja POKTAN, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum untuk memberdayakan petani pekebun kelapa sawit.

#### Penentuan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Sampel daerah dipilih secara purposive dengan ketentuan terdapat usaha tani kebun kelapa sawit rakyat baik pola kemitraan maupun pola swadaya (Nasir, 1983). Kemudian dari dalam sampel daerah tersebut diambil sampel POKTAN yang dipilih secara stratified random sampling, strata tersebut ditentukan menurut frekuensi peraturan perundangan yang diimplementasikan. Sampel terpilih menurut stratanya adalah:

Strata I, yang meliputi 4 peraturan formal, yaitu:
 (a). Permentan No.395/Kpts/OT.140/11/ 2005
 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian
 TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun; (b).

- Kepmentan No.273/Kpts/OT.1/160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; (c). Kepmentan No.545/Kpts/OT.160/9/2007 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan; (d). Permentan No.29/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pedoman penilaian POKTAN dan GAPOKTAN; (e). Permentan No.82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan POKTAN dan GAPOKTAN
- (2) Strata II, yang meliputi 3 peraturan formal, yaitu: (a). Permentan No.395/Kpts/OT.140/11/2005; (b). Kepmentan No.273/Kpts/OT.1/160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; (c). Permentan Permentan No.29/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pedoman penilaian POKTAN dan GAPOKTAN; (d). Permentan No.82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan POKTAN dan GAPOKTAN
- (3) Strata III, yang meliputi 2 peraturan formal, yaitu: (a). Permentan No.395/Kpts/OT.140/11/ 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun; (b). Permentan No.29/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pedoman penilaian POKTAN dan GAPOKTAN; (c). Permentan No.82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan POKTAN dan GAPOKTAN.

Lokasi penelitian yang dipilih meliputi:

- 1) Kebun Kembayan PTPN XIII (Kalimantan Barat) mewakili strata I;
- (2) PT Hindoli (Sumatera Selatan) mewakili strata II;
- (3) Kebun Tabara PTPN XIII (Kalimantan Timur) mewakili strata III.

Selanjutnya sampel responden sebagai unit analisis ditetapkan sejumlah 30 orang petani untuk setiap strata, yang dipilih secara acak sederhana (simple random sampling), sehingga secara keseluruhan berjumlah 90 orang (Mantra, 2004; Sigit, 2001). Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan mengisi questionnaire terstruktur, melalui wawancara mendalam; selain itu juga dilakukan melalui observasi, Focus Group Discussion (FGD),



dan analisis dokumen (Moleong, 2000; Krueger, 1988). Wawancara terhadap responden dilakukan secara berstruktur, karena peneliti meyakini bahwa pertanyaan dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai responden (Holloway and Wheeler, 1996).

#### Variabel dan Analisis Data

Variabel dan metode analisis yang digunakan adalah disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan pertama, yaitu mengkaji hubungan antara implementasi peraturan perundangan dengan kemampuan (kemandirian) POKTAN. Variabel yang digunakan yaitu tingkat implementasi peraturan perundangan dan tingkat (score) kemampuan kemampuan POKTAN.

Variabel bebasnya adalah tingkat implementasi peraturan perundangan dan variabel tak bebasnya yaitu Enam Aspek Kemampuan manajemen POKTAN perkebunan rakyat kelapa sawit. Enam Aspek Kemampuan POKTAN tersebut meliputi (Anonim, 2011):

- Kemampuan mencari, menyampaikan, informasi menganalisis memanfaatkan dan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil
- Kemampuan menyusun rencana dan merealisasi 2) kegiatan POKTAN
- Kemampuan mencapai hasil kegiatan sesuai baku teknis kebun
- Kemampuan memupuk modal untuk menghadapi risiko usaha
- Kemampuan manajerial
- Kemampuan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara POKTAN dan pihak lain.

Variabel bebas (independent variable) dan variabel tak bebas (dependent variable) tersebut, bersifat kualitatif, sehingga untuk membedakan besarannya (pengukurannya) ditentukan secara ordinal dengan menggunakan skala Likert (Singarimbun dan Effendi, 1989). Untuk mengetahui tingkat perbedaan variabel-variabel tersebut, digunakan metode analisis statistik non parametrik "Kruskal-Wallis". Berdasarkan uraian dari Siegel (1956: 184-193), maka dapat dikemukakan alasan digunakannya metode analisis ini, yakni: (a) ukuran variabelnya dengan sistem ordinal; (b) antar kategori dibandingkan satu sama lain; (c) sampel suatu kategori saling bebas dengan sampel kategori yang lain; (d) jumlah observasi suatu kategori tidak perlu selalu sama dengan jumlah observasi kategori yang lain; dan (e) dengan asumsi bahwa variabel yang diteliti mempunyai distribusi kontinyu.

Secara umum metode tersebut diformulasikan sebagai berikut (Siegel, 1956: 193-194):

$$H = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{j=1}^{k} \frac{R_j^2}{n_j} - 3(n+1) \infty X_{\alpha}^2(k-1), j = 1,2,3$$

dimana:

- a) H = nilai hitung uji Kruskal-Wallis;
- b) n = banyaknya sampel seluruh POKTAN dalam 3 lokasi (strata) kebun rakyat;
- c) R = jenjang skor sikap/perilaku (kemampuan) POKTAN untuk kebun rakyat kategori ke j (j = Sumsel, Kalbar dan Kaltim);
- d) n = banyaknya sampel POKTAN untuk kebun rakyat kategori ke j (j = Sumsel, Kalbar dan Kaltim);
- e) k = banyaknya kelompok kategori POKTAN (ada 3, yaitu kebun kelapa sawit rakyat Sumsel, Kalbar dan Kaltim).
- f) Nilai H hitung tersebut dibandingkan dengan X<sup>2</sup> (k-1) tabel; jika nilai H hitungnya lebih besar berarti ada perbedaan tingkat kemampuan antar tiga POKTAN yang signifikan, kemampuan tertinggi masuk kategori A (strata I), kemudian B (strata II), dan terendah C (strata III).

Tujuan kedua. Mengkaji hubungan antara kemampuan POKTAN dengan kinerja yang dikaitkan dengan tingkat adopsi teknologi dalam kultur teknis. Dalam kajian yang terkait dengan tujuan ini, variabel bebasnya yaitu kemampuan POKTAN perkebunan rakyat kelapa sawit dan variabel tak bebasnya yaitu tingkat adopsi kultur teknis. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik non parametrik "Kruskal-Wallis", yang uraian selanjutnya analog dengan analisis pada tujuan pertama.

Tujuan ketiga. Mengkaji apakah POKTAN yang ada telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan unsur-



unsur pemberdayaan dalam sikap dan perilaku anggota POKTAN. Metode analisisnya dengan menggunakan Analisis Komparasi Konstan (Moleong, 2000). Unsur-unsur pemberdayaan meliputi: (1) Memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan; (2) Memiliki akses terhadap informasi dan sumberdaya; (3) Memiliki banyak alternatif yang dapat dipilih; (4) Memiliki ketegasan, (5) Perasaan secara individu yang dapat membuat perubahan; (6) Belajar berpikir kritis, tidak belajar karena pengaruh keadaan, melihat sesuatu secara berbeda; (7) Belajar tentang dan menyatakan kemarahan untuk kebaikan; (8) Perasaan bukan untuk individu sendiri, tetapi perasaan merupakan bagian dari kelompok; (9) Pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak; (10) Menyebabkan perubahan dalam suatu kehidupan dan suatu masyarakat; (11) Belajar ketrampilan yang seseorang menyatakan penting; (12) Perubahan pendapat yang lain dari kompetensi dan kapasitas seseorang untuk bertindak; (13) Keluar dari rapat tertutup sebagai ungkapan protes, jika tak sepakat; (14) Pertumbuhan dan perubahan secara terus menerus dan memulai dari diri sendiri; (15) Meningkatkan citra diri yang positif dalam mengatasi kekurangan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan antara Implementasi Peraturan Perundangan dengan Kemampuan POKTAN

Secara legal, pelaksanakan peraturan ini berdasar pada Keputusan Mentan No.273/Kpts/OT.1/160/4/ 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, Permentan No.82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan POKTAN dan GAPOKTAN dan Permentan No.29/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang pedoman penilaian POKTAN dan GAPOKTAN. Hasil nilai (score ordinal skala Likert) terhadap Enam Aspek Kemampuan menjalankan bisnis, yang meliputi: (a).Kemampuan mencari, menyampaikan, memanfaatkan dan menganalisis informasi dalam bidang produksi dan pemasaran hasil; (b).Kemampuan menyusun rencana dan POKTAN; (c).Kemampuan merealisasi kegiatan mencapai hasil kegiatan sesuai baku teknis kebun; (d).Kemampuan memupuk modal untuk menghadapi risiko usaha; (e). Kemampuan manajerial;

(f).Kemampuan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara POKTAN dan pihak lain.

Hasil penilaian terhadap Enam Aspek Kemampuan anggota POKTAN yang berpedoman pada ketentuan skor (Lampiran 2) di tiga lokasi yaitu Kalbar, Sumsel, Kaltim berturut-turut adalah 15,67; 14,00 dan 12,47. Selanjutnya nilai dari ketiganya saling dibandingkan, dengan proses perhitungan statistik non parametrik Kruskal-Wallis. Hasil perhitungan nilai H = 21,47, lebih besar daripada  $X^{2}(_{0.01};2) = 9,21$ , berarti ada perbedaan Enam Aspek Kemampuan anggota POKTAN antar strata yang diwakili oleh lokasi, yaitu Kalbar, Sumsel, Kaltim, merespon materi yang berkaitan dengan dalam kemajuan usahatani; dalam hal ini nilai kemampuan POKTAN di Kalbar paling tinggi, diikuti oleh Sumsel dan Kaltim. Tingginya kemampuan POKTAN di Kalbar ini, meskipun kuantitas implementasi peraturannya lebih sedikit dibanding Sumsel, dimungkinkan karena intensitas pembinaan yang dilakukan secara rutin oleh aparat perusahaan mitra dan disertai oleh kesadaran anggota akan pentingnya kedisiplinan.

Kejadian yang berlangsung di Sumsel terkait dengan pemberlakukan peraturan perundangan, memang tidak semua stakeholder (terutama pengurus kelembagaan pekebun maupun anggotanya) memperoleh informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak peraturan perundangan diberlakukan di Sumsel, tetapi kalau tidak semua stakeholder memperoleh informasi dan memahami substansi peraturan tersebut; tentu tidak selalu menjadi penyebab keunggulan kemampuan POKTAN (Enam Aspek Kemampuan).

### Hubungan antara Kemampuan POKTAN dengan Kinerjanya

Kinerja yang dimaksud adalah terkait dengan tingkat adopsi teknologi dalam kultur teknis, terutama dalam pemeliharaan tanaman. Hasil penilaian kinerja rata-rata POKTAN (variabel tak bebas) di tiga lokasi yaitu Kalbar, Sumsel, Kaltim berturut-turut adalah 105,67; 97,78 dan 95,84. Kemudian nilai dari ketiganya saling dibandingkan, dengan proses perhitungan statistik non parametrik Kruskal-Wallis. Hasil perhitungan nilai H = 26,96 lebih besar daripada  $X^2(_{0,01};2) = 9,21$ , berarti ada perbedaan tingkat kinerja POKTAN antar 3 lokasi, yaitu Kalbar, Sumsel,



Kaltim, dalam menangani kegiatan yang berkaitan dengan usahatani; dalam hal ini kinerja POKTAN di Kalbar paling tinggi, diikuti oleh Sumsel dan Kaltim.

Tingginya kinerja POKTAN dalam adopsi teknologi kultur teknis ini dimungkinkan karena kedisiplinan seluruh anggota dan pengurus POKTAN serta kedisiplinan pihak perusahaan mitra dalam bimbingan, penyuluhan, pendampingan secara kontinyu. Jika dikaitkan antara kemampuan (Enam Aspek Kemampuan) dengan kinerja POKTAN terlihat berkorelasi positif, yaitu bahwa nilai (ordinal) kemampuan yang tinggi menyebabkan nilai (ordinal) kinerjanya yang tinggi. Sebaliknya nilai kemampuan POKTAN yang rendah menyebabkan nilai (ordinal) kinerjanya yang rendah pula.

Korelasi ini dapat dipahami, bahwa dengan nilai kemampuan POKTAN yang tinggi, berarti POKTAN memiliki potensi kapasitas untuk melaksanakan kultur teknis mendekati atau bahkan sesuai dengan standar "praktik manajemen yang terbaik atau Best Management Practice (BMP)". Keenam komponen dalam kemampuan POKTAN mengandung substansi upaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan komponen dalam BMP.

Komponen dalam BMP berupa kegiatan teknis dan pembiayaannya. Kegiatan teknis meliputi: 1) pemeliharaan jalan, 2) pemeliharaan saluran air, 3) penyiangan, 4) pemberantasan alang-alang, 5) pemangkasan, 6) pemupukan, 7) pemberantasan hama dan penyakit, 8) Sensus hama; sedangkan pembiayaannya meliputi: 1) upah tenaga kerja, 2) sewa alat, 3) pembelian bahan dan alat-alat kecil. Kegiatan teknis dan penggunaan alat tersebut harus dipraktekkan menurut cara, waktu dan frekuensi yang tepat; sedangkan penggunaan bahan harus dipraktekkan dengan dosis (takaran) dan kualitas yang tepat pula.

# Kriteria Sikap dan Perilaku Anggota POKTAN dikaitkan dengan Unsur-unsur Pemberdayaan

Kemampuan atau kapasitas individu sebagai hasil upaya pemberdayaan yang sudah dicapai oleh anggota POKTAN adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan
- b) Memiliki akses terhadap informasi dan sumberdaya

- c) Memiliki banyak alternative yang dapat dipilih
- d) Memiliki ketegasan
- e) Perasaan bukan untuk individu sendiri; tetapi perasaan merupakan bagian dari kelompok
- f) Pemahaman bahwa setiap anggota kelompok mempunyai hak
- g) Ada perubahan dalam suatu kehidupan masyarakat anggota POKTAN

Maka dari itu, kemampuan atau kapasitas individu sebagai hasil upaya pemberdayaan yang ideal, sesuai kriteria yang dikemukakan oleh *Narayan* (2005) belum sepenuhnya tercapai.

Sebagai ilustrasi terkait dengan akses terhadap informasi (point b), beberapa ketua (pengurus) POKTAN dan ketua (pengurus) koperasi digali pemahamannya tentang substansi dari sebagian peraturan perundangan. Ketika diajukan pertanyaan mengenai tujuan dari penyelenggaraan usaha perkebunan (merujuk pada UU No.18 tahun 2004), menghasilkan beberapa jawaban yang dikompilasikan sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh keuntungan yang dapat digunakan sumber kehidupan yang dapat mensejahterakan keluarga
- b) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, bagi yang semula sudah memiliki mata pencaharian dari sumber lain
- c) Membiayai pendidikan anak
- d) Untuk biaya menunaikan ibadah haji
- e) Memelihara kelestarian lingkungan hidup (menjaga penutup tanah, pembatasan penggunaan pestisida, parit drainase tetap dijaga agar airnya tetap mengalir
- f) Terbangunnya sarana/prasarana yang dapat mempermudah terlaksananya aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat termasuk pekebun.

Jawaban tersebut walaupun masuk akal dikalangan responden, namun tidak seluruhnya sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana tercantum dalam UU No.18 tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi UU tersebut dalam bentuk materi tertulis tidak merata di



lingkungan pekebun rakyat. Sebenarnya copy UU No. 18 Tahun 2004 telah didistribusikan ke setiap kantor dinas perkebunan.

Informasi tentang revitalisasi perkebunan (Permentan No. 33 Tahun 2006), yang substansinya antara lain pemberian peluang pemanfaatan dana untuk investasi pembangunan perkebunan (termasuk kelapa sawit) baik untuk perluasan maupun peremajaan, umumnya sudah sampai kepada pekebun. Sosialisasi secara resmi dari pihak terkait (kompeten) belum dilaksanakan di daerah penelitian (Sumatara Selatan, Kalimantan Barat), tetapi sebagian POKTAN di Kalimantan Timur sudah memanfaatkan dana revitalisasi untuk peremajaan.

Sementara itu informasi tentang penetapan harga TBS yang berlaku untuk setiap bulan di lingkungan kawasan kebun plasma, berjalan lancar. Meskipun demikian 60% dari mereka belum paham bahwa penetapan harga TBS tersebut terkait dengan pemberlakuan Permentan No 395 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Permentan No 17 Tahun 2010 dan terakhir direvisi menjadi Permentan No 14 Tahun 2013 (Anonim, 2005; Anonim, 2010; Anonim, 2013a).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan penggalian informasi di daerah survei penelitan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Tingginya kemampuan POKTAN (Enam Aspek Kemampuan) dalam manajemen usaha kebun kelapa sawit, tidak selalu disebabkan oleh tingginya kuantitas implementasi peraturan perundangan; tetapi lebih dimungkinkan karena intensitas pembinaan yang dilakukan secara rutin oleh aparat perusahaan mitra dan disertai oleh kesadaran anggota akan pentingnya kedisiplinan.
- 2) Kinerja POKTAN yang tinggi dalam adopsi teknologi (kultur teknis), ternyata berkorelasi posisif dengan kemampuan manajemen usaha kebun dalam tingkat yang tinggi. Maka dari itu kedisiplinan anggota dan pengurus POKTAN serta pihak perusahaan mitra dalam bimbingan, penyuluhan, pendampingan secara kontinyu sangat diperlukan.

3) Kemampuan atau kapasitas individu anggota POKTAN sebagai hasil upaya pemberdayaan yang ideal, sesuai kriteria yang dikemukakan oleh Narayan (2005) belum sepenuhnya tercapai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2004a. Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Jakarta.
- Anonim. 2004b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. DitJend Peraturan Perundang-undangan. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Jakarta.
- Anonim, 2005. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2006. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2007a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2007b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2008a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2008b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha



- Agribisnis Perdesaan (PUAP). Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2009. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.

  Badan Pemberdayaan Masyarakat,

  Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

  Berencana, 19 Desember 2009. Balikpapan.
- Anonim. 2010. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pedoman Penilaian Kelompok Tani (POKTAN) dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2013a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Anonim. 2013b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Awandana. 2009. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat. http://www.ziddu.com/ downloadlink/3477282/ Bahan Bacaan Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat.pdf
- Awang, San Afri et al. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga masyarakat Desa Hutan. Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.

- Holloway, I and Wheeler, S. 1996. Qualitative Research for Nurses. Blackwell Science.London.
- Krueger, Richard A. 1988. Focus Group, A Practical Guide for Applied Research. Sage Publications. London.
- Mantra, Ida Bagus. 2004. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Narayan, Deepa. 2005. Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. World Bank.
- Nasir, M. 1983. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Roes Setiyadi dan Mas Wigrantoro. 2007. Paradoks Pemahaman Kebijakan Publik. Alumni The Lee Kuan Yew School of Public Policy - NUS, Mahasiswa S3, Strategic Management, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Santoso, R Slamet. 2006. Model Dalam Kebijakan Publik. UGM Press. Yogyakarta.
- Siegel, S. 1956. Non Parametric Statistics for the Behavioral Science. McGraw-Hill Inc. New York.
- Sigit, S. 2001. Pengatar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis dan Manajemen. BPFE UST. Yogyakarta.
- Singarimbun, M dan S. Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.

Lampiran 1. Indikator tingkat adopsi teknologi.

Appendix 1. Indicator level of technology adoption.

No	Kogioton			Skor		
INO	Kegiatan	5	4	3	2	1
Α.	Frekuensi					
	1. Pemel. jalan	1bl 1x	±2bl 1x	±3bl 1x	±4bl 1x	≥5bl 1x
	2. Pemel sal air	6bl 1x	±7bl 1x	±8bl1x	9bl 1x	>10bl 1x
	3. Penyiangan	1bl 1x	±2bl 1x	±3bl 1x	±4bl 1x	>5bl 1x
	4. Pemberantasan alang²	2bl 1x	±bl 1x	±4bl 1x	±5bl 1x	>6bl 1x
	5. Pemangkasan	6bl 1x	±8bl 1x	±10bl1x	±12bl 1x	>12bl 1x
	6. Pemupukan	6bl 1x	±7bl 1x	±8bl 1x	±9bl 1x	>10bl 1x
	7. Pembr hama & penyakit	1th 1x	±1.5th1x	±2th1x	±2.5 th 1x	>3th1x
	8. Sensus hama	1mg1x	±2mg 1x	±3mg 1x	±4mg 1x	>5mg 1
	Skor A					
B.	Teknis dan dosis					
	1. Pemel jalan	b-p-k	b-p	k-p	k/p	t
	2. Pembr alang²	k-k-t	k-k-a-t	k-k-r	k-k-c-r	k-k-s-r
	3. Pemangkasan	SS	S	as	ks	ts
	4. Pemupukan					
	N (kg/pohon/tahun)	±3	±2.5	±2	±1.5	<1
	P (kg/pohon/tahun)	±2	±1.5	±1	±0.75	<0.6
	K (kg/pohon/tahun)	±3	±2.25	±1.75	±1.25	<0.75
	Mg (kg/pohon/tahun)	±2	±1.5	±1	±0.75	<0.5
	5. Pembr hama & penyakit	ss PHT	s PHT	as PHT	ks PHT	ts PHT
	Skor B					
	Skor (A+ B)					

**Keterangan**: b-p-k = batu pasir kerikil, t = tanah, k-k-t = kemikalia kadar tinggi sesuai dosis standar, k-k-a-t = kemikalia kadar agak tinggi, k-k-r = kemikalia kadar rendah, k-k-c-r = kemikalia kadar cukup rendah, k-k-s-r = kemikalia kadar sangat rendah, ss = sangat sesuai, s = sesuai, as = agak sesuai, ks = kurang sesuai, ts = tidak sesuai, ss PHT = sangat sesuai asas pemberantasan hama terpadu, s PHT = sesuai PHT, as PHT = agak sesuai PHT, ks PHT = kurang sesuai PHT, ts PHT = tidak sesuai PHT

Lampiran 2. Ketentuan skor untuk menilai kemampuan kelompok tani (POKTAN).

Appendix 2. Provisions socress to assess the ability of the farmer grups.

d. < 24% sesuai dengan kebutuhan usahatani

	Kemampuan mencari, menyampaikan, memanfaatkan dan meng	ganalisis informasi (produksi, mutu produks
	peluang pasar dan perkembangan harga)	
	1.1. Cara memperoleh informasi	(2)
	a. Mendatangi sumber informasi	(3)
	b. Menunggu informasi	(2)
	c. Tidak mencari informasi	(1)
	1.2. Sumber informasi	
	a. Petani maju	(4)
	b. Petugas lapangan	(3)
	c. Instansi lingkup departemen pertanian	(2)
	d. Surat kabar, radio, TV dll	(1)
	1.3. Bentuk informasi	
	a. Tertulis	(2)
	b. Lisan	(1)
	Target penyampaian informasi	
	a. > 75% anggota menerima informasi	(4)
	b. 50-74% anggota menerima informasi	(3)
	c. 25-49% anggota menerima informasi	(2)
	d. < 25% anggota menerima informasi	(1)
2.	. Kemampuan menyusun rencana dan merealisasikan kegiatan PO	OKTAN (meliputi produksi dan pemasaran)
	2.1. Penyusunan rencana kerja	
	a. Menyusun rencana kerja secara tertulis	(3)
	b. Menyusun rencana kerja tidak secara tertulis	(2)
	c. Tidak menyusun rencana kerja	(1)
	2.2. Cara penyusunan rencana kerja	
	a. Disusun bersama antara pengurus, anggota dan petuga	as (4)
	b. Disusun bersama antara pengurus dan anggota	(3)
	c. Disusun bersama antara pengurus dan anggota	(2)
	d. Disusun bersama antara pengurus dan anggota	(1)
	2.3. Proses penyusunan rencana kerja	
	a. Inisiatif pengurus dan anggota	(2)
	b. Inisiatif pengurus	(1)
	2.4. Kesesuaian rencana kegiatan dengan kebutuhan usahatani	
	a. >75% sesuai dengan kebutuhan usahatani	(4)
	b. 50-74% sesuai dengan kebutuhan usahatani	(3)
	c 25-49% sesuai dengan kebutuhan usahatani	(2)

(1)

(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

	3.2. Usaha pengembalian kredit	
	a. Tunggakan kredit 5%	(4)
	b. Tunggakan kredit 6-25%	(3)
	c. Tunggakan kredit 25-50%	(2)
	d. Tunggakan kredit 51-75%	(1)
	3.3. Pencatatan kredit	
	a. Ada catatan kelompok	(4)
	b. Tidak ada catatan kelompok	(3)
	c. Ada catatan anggota	(2)
	d. Tidak ada catatan anggota	(1)
4.	Kemampuan memupuk modal untuk menghadapai risiko usah	na dan melestarikan sumber daya alam
	4.1. Jumlah tabungan kelompok sebagai usaha untuk memi	upuk modal
	a. ± Rp 10.000.000,-	(5)
	b. ± Rp 7.500.000,-	(4)
	c. ± Rp 5.000.000,-	(3)
	d. ± Rp 2.500.000,-	(2)
	e. Tidak ada tabungan	(1)
	4.2. Pemanfaatan tabungan	
	a. Untuk kepentingan usahatani yang produktif	(4)
	b. Untuk kepentingan sosial anggota	(3)
	c. Untuk kepentingan desa	(2)
	d. Tidak jelas	(1)
5	. Kemampuan manajerial	
	5.1. Pelaksanaan pertemuan kelompok	
	a. Pertemuan kelompok sekali sebulan	(4)
	b. Pertemuan kelompok tergantung kebutuhan	(3)
	c. Pertemuan kelompok sekali-sekali	(2)
	d. Tidak pernah	(1)
	5.2. Kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok	
	a. > 75% dari jumlah anggota hadir	(4)
	b. 50-74% dari jumlah anggota hadir	(3)
	c. 25-49% dari jumlah anggota hadir	(2)
	d. < 24% dari jumlah anggota hadir	(1)
	5.3. Tingkat keteladanan ketua kelompok bagi anggota	
	a. >75% dapat diteladani anggota	(4)
	b. 50-74% dapat diteladani anggota	(3)
	c. 25-49% dapat diteladani anggota	(2)
		/4)

d. < 24% dapat diteladani anggota

(1)

5.4.	Pembagian kerja kelompok	
	a. Ada pembagian kerja yang jelas dan tertulis	(3)
	b. Pembagian kerja tak jelas dan tak tertulis	(2)
	c. Tidak ada pembagian kerja	(1)
5.5.	Administrasi kelompok	
	a. Baik	(4)
	b. Cukup	(3)
	c. Kurang	(2)
	d. Tidak ada administrasi	(1)
5.6.	Cara pembahasan masalah kelompok	
*	a. Dibahas bersama antara pengurus dan anggota	(4)
	b. Dibahas bersama antara pengurus dan petugas	(3)
	c. Dibahas oleh pengurus saja	(2)
	d. Tidak dibahas	(1)
5.7.	Kekompakan antara anggota dan pengurus	
	a. Kompak	(4)
	b. Cukup kompak	(3)
	c. Kurang kompak	(2)
	d. Tidak kompak	(1)
5.8.	Pengkaderan pengurus	
	a. Ada pengkaderan	(2)
	b. Tidak ada pengkaderan	(1)
Kem	ampuan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan	dengan nihak lair
	Kerjasama kelompok dengan pihak lain	derigan pinak ian
	a. Kerjasama sudah berjalan	(5)
1	b. Ada kerjasama tetapi belum berjalan	(4)
	c. Kerjasama baru dirintis	(3)
	d. Kerjasama masih berupa rencana kelompok	(2)
	e. Belum ada rencana kerjasama	(1)
6.2.	Ketaatan kerjasama kelompok dengan pihak lain	
	a. Dapat mematuhi perjanjian	(3)
	b. Kurang mematuhi perjanjian	(2)
	c. Tidak mematuhi perjanjian	(1)

6.

### **INDEKS PENGARANG**

Agusnar, H.	40, 124
Agustira, M. A.	134
Amalia, R.	134
Boer, R.	75
Buntaran, H.	115
Darlan, N. H.	75
Dja'far	10
Ernayunita	49
Faizah, R.	1, 56
Ginting, E. N.	20
Herawan, T.	31, 40, 115,124
Indriyati, L. T.	20
Lydiasari, H.	91
Nasrullah	115
Nugroho, B.	20
Nuryanto, E.	40, 124
Prasetyo, A. E.	82, 105
Priwiratama, H.	10
Purba, A. R.	1, 56, 64
Rahmadi, H. Y.	1, 56
Rivani, M.	31, 115
Samosir, Y. M. S.	49
Santoso, H.	20, 91
Siregar, H. H.	75
Soegianto, A.	64
Soetopo, L.	64
Sunindiyo, D.	105
Supena, N.	64
Susanto, A.	10, 82, 105
Sutandi, A	20
Tolentino, P. R.	105
Wahyono, T.	134
Wening, S.	1, 56
Wirjosentono, B.	40, 124
Yenni, Y.	1, 56, 64

### **INDEKS SUBYEK**

Asam ester	115
Agar murni	49
Agar teknis	49
Asam Lemak Sawit Distilat	124
Asetilasi	40
Bacillus thuringiensis	105
Cekaman Al	64
Desain blok	91
DRIS	20
Elaeidobius kamerunicus	82, 105
Embrio somatik	49
ENSO	75
Epoksi	124
Fruit set	82
Ganoderma	10
Graphical genotyping	56
HecRas	91
Hidrolisis	115
Hidrolisis asam	31
Homozigositas	56
Indeks DRIS	20
Indeks ketahanan cekaman	64
Insektisida	105
Karakterisasi	31
Kekerabatan genetik	1
Kelapa sawit	1, 20, 49, 56, 91
Kelapa sawit (Elaeis guineensis)	134
Keragaman genetik	1
Kinetika reaksi	115
Morfologi	115

Pasang surut	91
Pelepasan	82
Pemberdayaan	134
Penetasan	82
Perakaran	49
Peraturan-perundangan	134
Petani pekebun	134
Plasma nutfah	1, 56
Polen	82
Produksi kelapa sawit	75
Produktivitas	10
Rasio hara	20
Replanting dipercepat	10
Selulosa	40, 124
Selulosa asetat	40, 124
Selulosa ester lemak sawit	124
selulosa mikro-kristal	31
Sensitivitas	105
Sidik jari DNA	1
Simulasi	75, 91
SSR	1
Suhu muka laut	75
Tata kelola air	91
Tandan Kosong Kelapa Sawit	40
Tandan Kosong Sawit	31, 115, 124
Tunas	49